DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Amirudin, Zainal Arifin, 2003.*Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Bumi Angkasa.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Budiono, Herlien, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya*, Bandung: Citra Aditya

Busro, Achmad, 2011.*Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Harahap, M. Yahya, 1968.*Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni

H.S, Salim, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Cet.1., Jakarta: Sinar Grafika

Khairandy, Ridwan, 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana UI

K. Lubis, Suhrawardi, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Mertokusumo, Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Muhammad, Abdul Kadir, 2002.*Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003.*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Patrick, Purwahid, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju

Projodikoro, Wiryono, 2011.*Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju

R. Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Soemitro, Roni Hanitijo,1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Syahmin, 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tobing, G.H.S. Lumban, 2006.*Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Jakarta: Erlangga.

B. Tesis:

Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2008)

C. Internet:

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa, http://www.docstoc.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 2016.

Gatot, *Perikatan dan Perjanjian*, http://dokumentasihukum.blogspot.com/2007/02/tentang-perikatan-dan-perjanjian.html, diunduh pada tanggal 5 Februari 2016.

Herman, *Sanksi Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu* http://herman-notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukum-terhadap-akta-otentik-yang.html, diunduh pada tanggal 14 Februari 2016

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009